

## PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN

MAHDA WAHDATUNNISA

### ABSTRAK

*Hasil observasi penulis diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran selama ini masih kurang optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Sampah? 2) Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah?; 3) Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah? Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik dengan pendekatan kualitatif. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi dan wawancara). Jumlah informan sebanyak 10 orang yang terdiri dari 1 orang kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, 1 orang Kepala Bidang Pengelolaan sampah, limbah dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup, 1 orang kepala seksi pengelolaan sampah dan 7 orang petugas pengelola sampah. Teknik analisa data melalui data reduction (reduksi data), data display (penyajian data) dan verifikasi data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa: 1) Pelaksanaan pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Hermawati (2015:5) tentang kegiatan operasional pengelolaan sampah seperti kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah, pemindahan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah. Begitupula berdasarkan observasi diketahui pelaksanaan Pengelolaan Sampah belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah penampungan sampah sementara baik di sekitar pantai maupun di taman masih terbatas, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti, ketersediaan sarana pengangkut sampah belum memadai. 2) Adanya hambatan-hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dan ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan sampah belum memadai. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah penampungan sampah, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti. 3) Adanya upaya dalam melakukan pengelolaan sampah dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah dan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, selain itu melakukan pendekatan kepada masyarakat, mengoptimalkan keberadaan sarana pengangkut sampah dengan melakukan pembagian tugas menjadi dua shift.*

**Kata Kunci:** *Pelaksanaan, Pengelolaan, Sampah, Lingkungan Hidup.*

## A. PENDAHULUAN

Seiring dengan pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai umat manusia pada zaman modern ini, serta meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di setiap daerah di penjuru dunia maka eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran pun tidak dapat dihindari lagi. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi logis dari adanya upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup umat manusia yang sangat besar dan semakin kompleks. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup ini yang juga diikuti dengan peningkatan konsumsi akan banyak barang oleh masyarakat dalam jangka panjang dapat menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah meningkatnya volume sampah yang dihasilkan manusia.

Sejalan dengan potensi bertambahnya volume sampah yang mungkin diproduksi manusia, di sisi lain kemajuan peradaban manusia juga menuntut pada perlunya lingkungan yang sehat dan bersih. Hal ini sangat berhubungan dengan upaya manusia untuk meningkatkan derajat kesehatan mereka seiring dengan kemajuan peradaban dan hakekat tujuan pembangunan yang menginginkan kesejahteraan pada tiap sisi kehidupan. Pertemuan dua fenomena inilah menempatkan permasalahan sampah sebagai titik silang pertemuan yang menuntut penyelesaian. Pada saat ini permasalahan sampah bukan lagi menjadi permasalahan lokal maupun

nasional semata namun juga sudah menjadi permasalahan global.

Pengelolaan sampah saat ini menghadapi banyak tekanan terutama akibat besarnya timbulan sampah yang dihasilkan masyarakat baik produsen maupun konsumen. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sudrajat (2006:89) yang menyatakan bahwa permasalahan ini menjadi semakin kompleks dengan masih diterapkannya paradigma lama pengelolaan yang mengandalkan kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan yang membutuhkan anggaran yang semakin besar dari waktu ke waktu.

Permasalahan persampahan harus diantisipasi agar tidak menimbulkan bahaya pencemaran lingkungan yang semakin parah dikemudian hari, maka perlu dikembangkan sistem pengelolaan sampah dengan konsep *Reduce, Reuse dan Recycle* (3R). Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Masalah persampahan telah sepenuhnya menjadi tanggung jawab daerah dan diwajibkan untuk menyelenggarakan penanganan persampahan termasuk Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara lebih memadai, untuk kondisi tertentu TPA regional juga wajib dilaksanakan. Selain itu, pada Peraturan Pemerintah

No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis menyatakan bahwa pemerintah kabupaten/kota selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah, juga menyusun dokumen rencana induk.

Menurut SNI-19-3983-1995 menyatakan bahwa kota sedang memiliki jumlah penduduk 100.000-500.000 jiwa, sedangkan kota kecil memiliki jumlah penduduk <100.000 jiwa. Kabupaten Pangandaran dikategorikan sebagai kota sedang karena memiliki jumlah penduduk pada tahun 2015 sebanyak 363.684 jiwa, sehingga dalam kegiatan perencanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Pangandaran wajib menyusun dokumen PTMP. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga menyatakan bahwa kota sedang dan kecil diharuskan untuk menyusun Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan (PTMP).

Perencanaan Teknis dan Manajemen Persampahan merupakan rencana pengelolaan sampah yang meliputi aspek teknis dan non teknis. Aspek teknis meliputi pewadahan, pengumpulan, pemindahan, pengolahan, pengangkutan dan pemrosesan akhir, sedangkan aspek non teknis meliputi aspek peraturan,

kelembagaan, biaya dan peran serta masyarakat.

Pengelolaan sampah di kabupaten Pangandaran hingga saat ini masih menggunakan sistem open dumping atau penimbunan secara terbuka serta belum memenuhi standar yang memadai. Akibatnya berpeluang menimbulkan masalah baru, yaitu membawa dampak pencemara. Baik pencemaran air, darat maupun udara serta menimbulkan berbagai macam penyakit. Pengelolaan sampah saat ini masih menghadapi beberapa masalah, antara lain masih banyak masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan pengelolaan sampah. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah pada tahun 2016 hanya 6% dengan jumlah sampah terangkut sebesar 34,632 m<sup>3</sup>/hari.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, kinerja pengelolaan sampah belum optimal dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanganan sampah pada semua sistem pengelolaan sampah, dan masih sedikit masyarakat maupun pihak swasta yang melakukan upaya 3R untuk pengelolaan sampah. Penerapan PTMP ini diharapkan dapat mengatasi beragam permasalahan sampah di Kabupaten Pangandaran sehingga menciptakan kondisi kebersihan, keindahan dan kondisi kesehatan masyarakat yang baik, yang akhirnya berpengaruh pada perkembangan fisik Kabupaten Pangandaran.

Keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah oleh

pemerintah dan kurangnya kesadaran masyarakat serta memunculnya kawasan permukiman padat penduduk baru di Kabupaten Pangandaran, berdampak kepada semakin turunnya kualitas lingkungan permukiman. Sebagai contoh, dengan tidak tersedianya sarana pembuangan sampah, maka masyarakat akan cenderung mencemari lingkungan dengan sampah sehingga muncul timbulan sampah akan teronggok di sudut permukiman, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir pantai, di bawah jembatan, di sungai-sungai dan lain sebagainya, yang hal ini banyak ditemukan di Kabupaten Pangandaran saat ini.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran memiliki fungsi dan tanggung jawab untuk membantu bupati dalam mengoptimalkan kegiatan-kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dibidang lingkungan hidup dan kebersihan.

Terkait dengan hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan organisasi pelaksana yang diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan

kebersihan dan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian maka diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mampu melaksanakan kewenangan yang dilimpahkannya dengan baik dalam hal meningkatkan pelayanan kebersihan dan pengelolaan sampah dengan baik kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam mengelola sampah masih dengan cara sederhana yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah-sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak/wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari tempat sampah di rumah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampai ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Pendekatan ini akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena variabel luas lahan TPA adalah konstan/tetap, sedangkan laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk terus meningkat, yang berdampak juga pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Lahan yang semakin terbatas tidak mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah yang terjadi sekarang maupun di masa datang.

Oleh karena itu upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat selama ini terkendala oleh sarana dan prasarana yang sudah kurang memadai sehingga penanganan dan pelayanan sampah di Kabupaten Pangandaran tidak berjalan optimal. Seperti halnya kontainer, truk sampah, keranjang dorong bahkan beberapa bak sampah juga rusak. Dari 8 unit armada dum truk pengangkut sampah yang ada saat ini setengahnya tidak layak pakai karena sudah tua produksi tahun 1985. Sarana prasarana lain yang kondisinya rusak yaitu, kontainer, *crane*, *loader bulldozer* dan *excavator*. Idealnya untuk kebutuhan sarana armada truk pengangkut sampah setidaknya lebih dari 20 unit. Sedangkan kondisi saat ini pelayanan di wilayah objek wisata pangandaran saja hanya ada lima unit. Sisanya disebar di kecamatan lain seperti parigi dua unit, Cijulang dua unit. Selain itu saat ini karyawan kebersihan yang tersebar di Kabupaten Pangandaran hanya berjumlah 17 orang.

Upaya peran serta masyarakat dalam mereduksi sampah disumber sampah masih belum terlihat, sedangkan kegiatan reduksi yang dilakukan pemulung di TPS masih sangat kecil, sehingga masih dibutuhkan reduksi sampah di TPA guna mengurangi sampah yang akan dibuang ke landfill (area penimbunan).

Permasalahan tersebut sejalan dengan hasil pengamatan penulis, diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas

Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran selama ini masih kurang optimal. Hal itu terlihat dari indikator-indikator sebagai berikut:

1. Ketersediaan wadah sampah sesuai dengan jenis sampah masih belum memadai sehingga masyarakat membuang sampah pada satu wadah sehingga hal tersebut menyulitkan dalam pengelolaan sampah untuk daur ulang karena tidak ada pemilahan sampah organik maupun anorganik.
2. Tidak pastinya jadwal pemindahan sampah dari tempat pengumpulan sampah ke tempat pemrosesan akhir karena kurangnya pegawai pengelola sampah yang ada hanya 17 pegawai padahal idealnya minimal 25 pegawai sehingga menyebabkan sampah semakin banyak dan mengganggu kenyamanan masyarakat dan pengunjung karena menimbulkan bau.
3. Ketersediaan sarana pengangkut sampah yang masih kurang karena hanya ada 8 truk pengangkut sampah padahal idealnya minimal tersedia 20 truk pengangkut sampah sehingga hal tersebut menyebabkan banyaknya sampah yang tidak terangkut.
4. Belum dilakukannya pengolahan sampah sehingga keberadaan sampah semakin menumpuk karena belum dimanfaatkan baik untuk kompos maupun untuk daur ulang

yang dapat memberikan manfaat secara ekonomis.

Dari uraian latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul : **“Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran”**.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dan dikaji oleh penulis sebagai berikut.

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran ?
2. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran ?
3. Upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran?

## **B. LANDASAN TEORITIS**

Pengelolaan sampah telah menjadi suatu permasalahan penting dan mendesak bagi para pengambil kebijakan seiring dengan peningkatan secara signifikan jumlah sampah yang dihasilkan dan perubahan karakteristik sampah akibat perubahan gaya hidup masyarakat, industrialisasi dan urbanisasi.

Pengelolaan sampah merupakan hal yang tidak bisa dilepaskan dari adanya pembangunan. Timbulan sampah menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan pembangunan, dan perubahan pola konsumsi.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2008 yang dimaksud dengan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau/proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 dinyatakan bahwa : Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga. Sedangkan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.

Nugroho, (2013:98) menyatakan bahwa : “Sampah adalah barang yang dianggap sudah tidak terpakai dan dibuang oleh pemilik/pemakai sebelumnya, tetapi bagi sebagian orang masih bisa dipakai jika dikelola dengan prosedur yang benar”.

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010, sampah adalah

sisanya kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Permasalahan sampah merupakan hal yang krusial (sulit terselesaikan). Bahkan, dapat diartikan sebagai masalah kultural/kebiasaan karena dampaknya mengenai berbagai sisi kehidupan sehingga keberadaan sampah perlu adanya pengelolaan sampah yang benar.

Menurut Mulia (2015:15) menyatakan bahwa pengelolaan sampah adalah : Pengaturan yang berhubungan dengan pengendalian timbulan sampah, penyimpanan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah dengan cara merujuk pada dasar –dasar yang terbaik mengenai kesehatan masyarakat, ekonomi, teknik, konservasi, estetika dan pertimbangan lingkungan yang lain dan juga tanggap terhadap perilaku massa.

Syafrudin dan Priyambada (2011:77), menyatakan : Pengelolaan persampahan mempunyai tujuan yang sangat mendasar yang meliputi meningkatkan kesehatan lingkungan dan masyarakat, melindungi sumber daya alam (air), melindungi fasilitas sosial ekonomi dan menunjang sektor strategis.

Rahardyan dan Widagdo, (2015:98) menyatakan bahwa : "Sistem pengelolaan sampah pada dasarnya dilihat sebagai komponen-komponen

subsistem yang saling mendukung satu sama lain untuk mencapai tujuan yaitu kota yang bersih, sehat dan teratur".

Dengan demikian pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Menurut Hermawati (2015:5) menyatakan bahwa kegiatan operasional pengelolaan sampah dapat dilakukan dalam berbagai kegiatan seperti :

a. Pevadahan sampah;

Pevadahan merupakan cara penampungan sampah sementara di sumbernya baik sampah yang dihasilkan oleh individu maupun komunal, baik yang bersifat sementara maupun yang bersifat tetap, seperti TPA. Idealnya wadah sampah disesuaikan dengan jenis sampah (organik atau anorganik atau bahan berbahaya) agar pengelolaan selanjutnya menjadi lebih mudah, terutama untuk tujuan daur ulang. .

b. Pengumpulan sampah;

pengumpulan sampah dilakukan dari sumber sampah untuk diangkut ke tempat penampungan sementara, atau ke tempat pengolahan sampah, atau langsung ketempat pemrosesan akhir tanpa melalui proses pemindahan. Lama waktu dan mekanisme proses pengumpulan sampah berbeda dari satu kota besar ke kota besar lainnya.

c. Pemindahan sampah;

Pemindahan sampah merupakan proses memindahkan dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir. Pada umumnya pemindahan sampah di kota besar dilakukan oleh petugas kebersihan dengan menggunakan peralatan mekanik maupun manual atau kombinasi keduanya.

d. Pengangkutan;

Pengangkutan sampah pada umumnya menggunakan alat pengangkut. Di daerah pemukiman, pengangkutan sampah umumnya menggunakan gerobak atau truk kecil. Untuk pengangkutan ke TPA pada umumnya menggunakan truk besar sesuai dengan volume sampah yang harus diangkut. Peralatan pengangkutan sampah di kota besar antara lain: truk, dump truk, compactor truk, multi loader, crane, dan mobil penyapu jalan.

e. Pengolahan sampah (termasuk pemanfaatan sampah untuk berbagai tujuan). Sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) rumah tangga dikelola secara khusus sesuai aturan yang berlaku di daerah tersebut.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah menyatakan bahwa :

Sistem pengelolaan sampah dilakukan melalui :

a. pemilahan;

b. pengumpulan;

c. pengangkutan;

d. pengolahan; dan

e. pemrosesan akhir sampah.

Dengan demikian maka dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis. Lamanya penelitian selama 8 bulan. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 10 orang. Teknik analisa data dengan dengan cara deskriptif, yaitu mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta menginterpretasikannya pada data kualitatif.

### D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 1. Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Hermawati (2015:5) tentang kegiatan operasional pengelolaan sampah seperti kegiatan pewadahan sampah, pengumpulan sampah,

pemindahan sampah, pengangkutan dan pengolahan sampah.

Untuk lebih jelasnya penulis sajikan hasil penelitian tentang pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan pewadahan sampah,

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengolahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik yang disebabkan oleh kurangnya menyediakan wadah penampungan sampah sementara sehingga sampah berserakan karena tidak dapat menampung sampah selain itu wadah sampah belum disesuaikan dengan jenis sampah karena selama ini wadah sampah belum dibedakan berdasarkan jenisnya, hal lainnya dikarenakan pewadahan sampah belum dapat memudahkan dalam pengelolaan sampah terutama untuk daur ulang karena sampai saat ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran belum memiliki alat pengolah sampah untuk melakukan daur ulang sampah.

#### 2. Pengumpulan sampah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengumpulan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat Pengumpulan sampah belum dapat dilakukan dari sumber

sampah karena masih banyak sampah di pemukiman penduduk belum dapat diangkut, selain itu pengambilan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara belum dapat dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan jadwal pengumpulan sampah dari sumber sampah.

#### 3. Pemindahan sampah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengumpulan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya sarana dan prasarana yang memadai dalam melakukan pemindahan sampah dilakukan dari tempat pengumpulan ke tempat pemrosesan akhir sekain itu masih kurangnya dukungan petugas yang memadai dalam melakukan pemindahan sampah serta minimnya peralatan yang memadai dalam melakukan pemindahan sampah.

#### 4. Pengangkutan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengumpulan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya melakukan pengangkutan sampah secara rutin dari sumber sampah dan pengangkutan sampah belum dilakukan untuk menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah dan kurangnya ketersediaan sarana pengangkut sampah yang memadai sehingga sampah dapat terangkut dari sumber sampah.

## 5. Pengolahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengumpulan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya melakukan pengolahan sampah untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan belum dapat melakukan pemanfaatan terhadap sampah yang ada di TPA dan belum dilakukannya pengelolaan sampah berbahaya dan beracun yang dilakukan secara khusus.

## 2. Hambatan-hambatan

### **Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, yang antara lain :

#### 1. Kegiatan pewadahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan dalam menyediakan wadah penampungan sampah sementara hal ini disebabkan oleh kurangnya ketersediaan anggaran sehingga ketersediaan wadah penampungan sampah sementara yang disediakan oleh Dinas Lingkungan hidup dan kebersihan masih jauh dari ideal sehingga tempat-tempat tertentu saja yang ditempatkan wadah sampah selain itu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga wadah sampah

sehingga banyak wadah sampah yang rusak.

#### 2. Pengumpulan sampah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengumpulan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat adanya beberapa hambatan seperti keterbatasan sarana pengangkut sampah yang kurang memadai seperti jumlah kendaraan roda tiga yang semakin sedikit jumlahnya karena rusak dan tidak ada anggaran untuk memperbaiki kembali sehingga menghambat proses pengumpulan sampah. Seperti banyaknya sampah di tempat pemukiman penduduk yang tidak diangkut oleh petugas karena tidak bias dilalui oleh truk pengangkut sampah dan kurangnya masyarakat membantu untuk mengumpulkan sampah dan membuangnya ketempat pembuangan sampah sementara sehingga menyebabkan sampah tidak terangkut di wilayah tersebut serta kurangnya dukungan sarana yang memadai seperti keberadaan alat pengangkut sampah yang jumlahnya terbatas sehingga tidak dapat melakukan pengambilan sampah sesuai dengan yang ditetapkan.

#### 3. Pemandahan sampah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemindahan sampah dalam pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat adanya beberapa hambatan seperti kurangnya dukungan sarana dan

prasarana serta kurangnya kesadaran petugas dalam melakukan pengumpulan sampah dan masih adanya pegawai yang kurang memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta masih kurangnya kesadaran petugas untuk dapat membantu petugas yang sedang melaksanakan pemindahan sampah sehingga menyebabkan jadwal pemindahan yang seharusnya dilaksanakan secara rutin ternyata tidak dapat dilaksanakan serta kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam menyediakan anggaran yang memadai untuk menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan oleh petugas masih kurang sehingga pemindahan sampah yang dilaksanakan oleh petugas masih kurang.

#### 4. Pengangkutan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik mengingat kurangnya melakukan pengangkutan sampah secara rutin dari sumber sampah dan pengangkutan sampah belum dilakukan untuk menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah dan kurangnya ketersediaan sarana pengangkut sampah yang memadai sehingga sampah dapat terangkut dari sumber sampah. Selain itu jarak tempuh yang jauh dari sumber sampah kepada TPA menyebabkan keterbatasan alat angkut akan mempengaruhi rutinitas pengangkutan sampah.

#### 5. Pengolahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya beberapa hambatan dalam pengolahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan belum terlaksana dengan baik hal ini dikarenakan kurang dimilikinya alat pengolah sampah sehingga sampah yang ada di TPA tidak dapat dilakukan pengolahan sampah untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan belum dapat melakukan pemanfaatan terhadap sampah yang ada di TPA dan belum dilakukannya pengelolaan sampah berbahaya dan beracun yang dilakukan secara khusus.

### **3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran**

Berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya berbagai hambatan sehingga dilakukan upaya untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, yang antara lain sebagai berikut :

#### 1. Kegiatan pewadahan sampah,

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dalam menyediakan wadah penampungan sampah seperti melakukan pengelolaan sampah serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti para pengusaha untuk

dapat membantu menyediakan tong sampah minimal di tempat-tempat usahanya sehingga dapat memudahkan petugas dalam melakukan pengangkutan sampah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah serta melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah untuk dapat menambah anggaran dinas serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti pengusaha yang ada di Pangandaran untuk dapat membantu menyediakan wadah sampah.

#### 2. Pengumpulan sampah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dilakukan berbagai upaya dalam melakukan pengumpulan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang antara lain dilakukan dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak supaya dapat membantu proses pengumpulan sampah dari sumber sampah dan mengajak kerjasama dengan masyarakat terutama yang berada di tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh petugas dan meningkatkan ketersediaan dukungan sarana yang memadai seperti keberadaan alat pengangkut sampah yang secara rutin dilakukan perawatan sehingga tidak mengalami gangguan ketika digunakan untuk mengangkut sampah.

#### 3. Pемindahan sampah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pemindahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilakukan berbagai upaya

seperti menyediakan sarana dan prasarana khususnya armada pengangkut sampah sehingga petugas dapat melakukan pemindahan sampah dari TPS ke TPA selain itu dilakukan upaya dengan meningkatkan kesadaran pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta meningkatkan kesadaran petugas untuk dapat membantu petugas yang sedang melaksanakan pemindahan sampah sehingga pemindahan sampah dapat dilaksanakan secara rutin serta memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk menyediakan berbagai peralatan yang dibutuhkan oleh petugas sehingga petugas dapat melaksanakan pemindahan sampah sesuai dengan yang telah ditugaskan.

#### 4. Pengangkutan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengangkutan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilakukan dengan berbagai upaya seperti melakukan perawatan secara rutin terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut sampah sehingga petugas dapat menggunakan kendaraan tersebut setiap kali dibutuhkan dan memberikan pengarahan kepada masyarakat supaya memiliki wadah sampah untuk jenis sampah baik organik maupun anorganik karena hal tersebut dapat membantu petugas nantinya di TPA supaya tidak perlu melakukan pemisahan sampah lagi serta melakukan penambahan berbagai sarana yang dapat membantu petugas dalam melakukan pengangkutan

sampah dari sumber sampah misalnya memperbaiki gerobag maupun kendaraan roda tiga yang selama ini kurang dipelihara padahal manfaatnya sangat besar untuk melakukan pemungutan sampah dari tempat-tempat sempit yang tidak bisa dilalui oleh kendaraan seperti truk.

#### 5. Pengolahan sampah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengolahan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan di TPA yang bekerjasama dengan masyarakat sekitar untuk melakukan pengolahan sampah sehingga sampah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat seperti dijadikan pupuk kompos maupun dijadikan kerajinan bagi sampah yang bisa dimanfaatkan dan melakukan pemilahan sampah yang ada di TPA sehingga apabila sampah yang bisa dimanfaatkan dapat dipisahkan dan yang tidak bisa dimanfaatkan bisa dibakar dan hasil pembakaran sampah dijadikan sebagai pupuk kompos yang dapat digunakan oleh masyarakat selain itu Dinas bekerjasama dengan pihak swasta untuk mengadakan kerjasama dalam pengelolaan sampah walaupun memang saat ini masih dalam proses kerja sama serta melakukan kerjasama dengan petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk melakukan pemilahan sampah B3 dan melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk dapat memilah sampah B3 pada wadah khusus selain itu sampah B3 yang ada di TPA

ditimbun dengan tanah sehingga tidak berbahaya bagi masyarakat di sekitar tempat pembuangan sampah akhir.

### E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik sesuai dengan pendapat Hermawati (2015:5) tentang kegiatan operasional pengelolaan sampah seperti penyediaan wadah penampungan sampah sementara belum tersedia, pengumpulan sampah belum dilaksanakan sesuai dengan jenisnya karena sumber sampah yang dari pemukiman biasanya bersatu atau tidak dilakukan pemilahan, proses pemindahan sampah belum dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal karena kurangnya kendaraan untuk memindahkan sampah tersebut. Begitupula berdasarkan observasi diketahui bahwa pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah penampungan sampah sementara baik di sekitar pantai maupun di taman masih terbatas

sehingga tidak dapat menampung sampah, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti sehingga masih banyak sampah yang tidak terangkut, ketersediaan sarana pengangkut sampah belum memadai sehingga tidak dapat melakukan pemungutan sampah sesuai dengan yang ditentukan dan belum dikelolanya sampah sesuai dengan jenisnya sehingga belum memberikan manfaat secara ekonomi karena biasanya semua sampah di TPA di bakar karena memang tidak memiliki sarana pengolah sampah.

2. Hambatan-hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dalam memenuhi kebutuhan petugas dalam melakukan pengelolaan sampah selain itu perhatian dan kesadaran baik pemerintah maupun masyarakat masih kurang dalam melakukan pengelolaan sampah selain itu ketersediaan sarana dan prasarana dalam melakukan pengelolaan sampah belum memadai sehingga menyebabkan sampah belum dapat dikelola dengan baik. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui adanya hambatan-hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran belum terlaksana dengan baik hal ini dibuktikan dengan ketersediaan wadah

penampungan sampah sementara baik di sekitar pantai maupun di taman masih terbatas sehingga tidak dapat menampung sampah, jadwal pengangkutan sampah tidak pasti sehingga masih banyak sampah yang tidak terangkut, ketersediaan sarana pengangkut sampah belum memadai sehingga tidak dapat melakukan pemungutan sampah sesuai dengan yang ditentukan dan belum dikelolanya sampah sesuai dengan jenisnya sehingga belum memberikan manfaat secara ekonomi karena biasanya semua sampah di TPA di bakar karena memang tidak memiliki sarana pengolah sampah.

3. Upaya-upaya dalam melakukan pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran dilakukan dengan mengajukan anggaran kepada pemerintah daerah untuk mengatasi keterbatasan anggaran dalam pengelolaan sampah selain itu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengelolaan sampah, selain itu melakukan pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat memisahkan sampah berdasarkan jenisnya dari sumber sampah untuk dapat mempermudah dalam melakukan daur ulang sampah, mengoptimalkan keberadaan sarana pengangkut sampah dengan melakukan pembagian tugas menjadi dua shift bagi pegawai dalam melakukan pemungutan sampah sehingga sampah dapat

terangkt dari sumbernya. Selain itu melakukan pengelolaan sampah yang termasuk jenis B3 dengan melakukan penimbunan sampah sehingga tidak mencemari masyarakat di sekitar TPA. Begitupula berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa adanya upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan pelaksanaan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran yaitu dengan melakukan berbagai pendekatan kepada pemerintah daerah untuk mengatasi ketersediaan anggaran dan sarana prasarana yang kurang memadai dalam pengelolaan sampah selaian itu melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat maupun petugas kesehatan terkait dengan pemilahan sampah sehingga dapat memilah sampah yang termasuk sampah organik, anorganik maupun sampah B3 sehingga dapat memudahkan petugas dalam melakukan pengolahan sampah, upaya lainnya yang dilakukan yaitu dengan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk dapat melakukan pengolahan sampah di TPS sehingga keberadaan sampah dapat dimanfaatkan selain itu dilakukan penimbunan sampah yang termasuk sampah B3 supaya tidak menimbulkan bahaya bagi masyarakat

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Hermawati. 2015. *Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkotaan*. Yogyakarta: Plantaxia.
- Mulia. 2015. *Kesehatan Lingkungan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nugroho. 2013. *Menyelamatkan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Sampah*. Bekasi: Cahaya Pustaka.
- Priyambada, Ika Bagus. 2011. *Pengelolaan Limbah Padat (Sampah) Perkotaan, Hand Out Sistem Pengelolaan Limbah, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Lingkungan, Program Magister Teknik Sipil Universitas Diponegoro Semarang*.
- Sudrajat. 2006. *Mengelola Sampah Kota*. Jakarta: Penabar Suwadaya.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, fungsi, Uraian Tugas

dan Tata Kerja Dinas  
Lingkungan Hidup dan  
Kebersihan Kabupaten  
Pangandaran.